

# Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

Agus Widodo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara

Korespondensi: \* [67aguswidodo@gmail.com](mailto:67aguswidodo@gmail.com)

---

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.355> | halaman: 268 - 292

---

Dikirim: 09-08-2024 | Diterima: 13-11-2024 | Dipublikasikan: 30-11-2024

---

## Abstrak

Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi, terakhir tahun 2023 sebesar 14,9 % atau sebanyak 138,99 ribu jiwa. Berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan namun belum efektif, sehingga perlu mengevaluasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terutama dalam mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan sampai di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan, tersedianya data kemiskinan By Name By Address yang lengkap dengan informasi penyebab kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil keluarga miskin, serta program penanganan kemiskinan yang lebih banyak pada program pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan usaha mikro kecil keluarga miskin. Dalam upaya mengefektifkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan direkomendasi kebijakan: 1. Pemerintah membentuk TKPK tidak hanya sampai di tingkat Kabupaten / Kota namun sampai Kecamatan hingga Desa / Kelurahan; 2. Kepala Daerah memfasilitasi TKPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan secara terpadu melakukan Pendataan Kemiskinan by name by address (BNBA) lengkap dengan informasi penyebab kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin; 3. Kepala Daerah lebih meningkatkan peran TKPK dalam program kegiatan Pemberdayaan UMK keluarga miskin.

**Kata kunci:** miskin; TKPK; desa; kelurahan; kecamatan; UMK; Banjarnegara.

---

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Banjarnegara secara geografis terletak di antara  $7^{\circ}12'-7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}45'50''$  Bujur Timur. Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 106.970,997 ha atau 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Penggunaan lahan menurut jenisnya dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah seluas 12.939,63 Ha (12,09%), bukan lahan sawah seluas 74.520,92 Ha (69,66%), dan lahan bukan pertanian seluas 19.511,15 Ha (18,23%). Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah rawan terjadi bencana alam dengan jenis bencana yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir.

Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebelah Utara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, Sebelah Timur Kabupaten Wonosobo, Sebelah Selatan Kabupaten Kebumen, Sebelah Barat Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Banjarnegara memiliki 20 Kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan. Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebanyak 1.047.226 jiwa, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,82 persen dari jumlah penduduk tahun 2022, dengan kepadatan penduduk 979 jiwa / km<sup>2</sup>.

Potensi pariwisata cukup dikenal meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam terletak di kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan wisata Arung Jeram Sungai Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan wisata alam Curug Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, dan kawasan wisata Pemandian Air Panas, kawasan wisata Budaya terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Keramik di Klampok, kampung Bambu di Mandiraja dan kawasan wisata sentra Batik di Susukan. Kawasan pariwisata buatan terletak di kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan Pemandian Air Panas D'qiano di Kecamatan Batur.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 4,98 persen (tahun 2022 sebesar 5,29 persen). Pertumbuhan ini sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional sebesar 5,31 persen.

Tingkat pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 sebesar 6,26 % menurun dibanding tahun 2022 sebesar 6,38 % namun masih diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,13 % dan Nasional sebesar 5,32 %.

*Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas hidup dalam aspek sosial dan ekonomi di suatu daerah. IPM mempertimbangkan taraf hidup yang tercermin melalui pendidikan, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Tingkat pendapatan yang rendah tidak selalu mengurangi IPM, dan tingginya pembangunan manusia tidak selalu diiringi oleh pendapatan yang tinggi (Todaro, 2011:57 dalam Prayoga, 2023). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah / negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 berada di angka 68,61, meningkat menjadi 69,16 pada tahun 2023

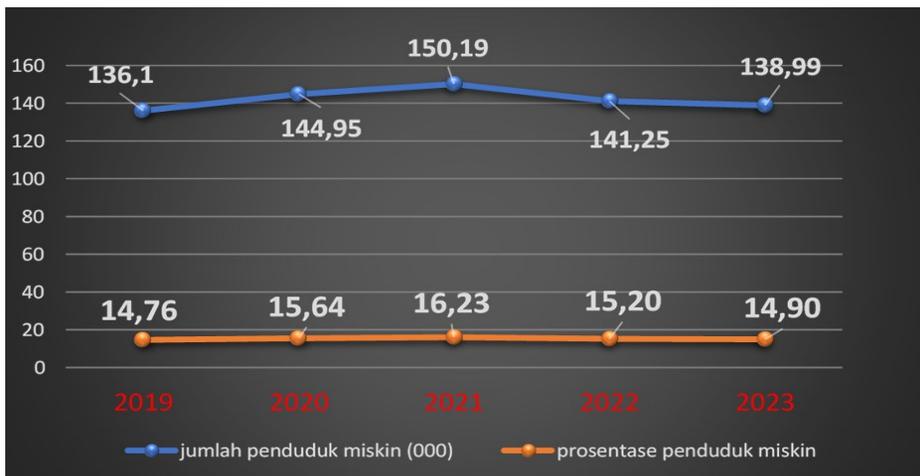
dengan Harapan Lama Sekolah sebesar 11,82 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,86 tahun, Usia Harapan Hidup 74,50 tahun, dan Pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp 10.226,00 ribu per tahun. IPM ini masih di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan Nasional sebesar 74,39.

### Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi yang dinamis. Penduduk yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori tidak miskin bisa jadi di tahun berikutnya jatuh menjadi penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi memegang peran penting dalam masalah kemiskinan, juga kejadian luar biasa yang terjadi juga mempengaruhi kondisi suatu wilayah atau Negara.

Penduduk miskin menurut BPS (2023) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 sebesar Rp. 380.046,00 per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,89 persen dari Rp 351.333,00 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara jauh lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah Rp. 477.580,00 dan Nasional Rp. 550.458,00.

Selama kurun waktu 2019–2023 angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara fluktuasi dari 14,76% tahun 2019 menjadi 14,90% pada tahun 2023 (masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah 10,77% dan Nasional 9,36%). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 138,99 ribu jiwa, menurun 2,26 ribu jiwa dibanding tahun 2022 sebanyak 141,25 ribu jiwa. Sebagaimana terlihat dalam gambar 1.



**Gambar 1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019–2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin (P0), namun juga dimensi lainnya yaitu tingkat kedalaman (P1) dan tingkat keparahannya (P2). *Indeks Kedalaman Kemiskinan* (Poverty Gap Index, P1) adalah ukuran yang menunjukkan jarak rata-rata antara pengeluaran masyarakat miskin dan garis kemiskinan (Wardani dkk, 2021). Semakin rendah nilai P1, semakin dekat pengeluaran rata-rata masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan atau perbaikan standar hidup di kalangan masyarakat miskin. Sedangkan *Indeks Keparahannya Kemiskinan* (Poverty Severity Index atau P2) adalah ukuran yang menggambarkan variasi pengeluaran di antara

penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang lebih besar, yang berarti distribusi kesejahteraan di antara masyarakat miskin kurang merata. (BPS, 2019 dalam Situmorang dkk 2020)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 stagnan dibandingkan kondisi tahun 2022, tetap di angka 2,34. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara terhadap garis kemiskinan cenderung tidak mengalami perubahan, dengan kata lain tingkat kesejahteraan penduduk miskin cenderung tidak mengalami peningkatan. Kondisi P1 Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibanding Nasional sebesar 1,53 dan Provinsi sebesar 1,75. Disisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2022, dari 0,48 menjadi 0,56. Hal ini mengindikasikan perbedaan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin di tahun 2023 semakin melebar dibandingkan tahun 2022. Kondisi P2 Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi bila dibandingkan nasional 0,38 dan provinsi 0,42.

Terkait kemiskinan ekstrim, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan ekstrem. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Penduduk miskin ekstrim merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Perbedaannya dapat dilihat dari sisi pengeluaran seperti dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Perbedaan Garis Kemiskinan Ekstrem dan Garis Kemiskinan Nasional

Keterangan	Kemiskinan Ekstrem	Kemiskinan Nasional
Pengeluaran/orang/hari	Rp 10.739	Rp 15.750
Pengeluaran/orang/bulan	Rp. 322.170	Rp. 472.525

Sumber: BPS, 2021

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari semula 3,95 persen sekarang tinggal 1,53 persen dengan sekitar 14,23 ribu penduduk yang miskin ekstrem, yang semula mencapai 36,59 ribu penduduk (Berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-1181/33000/VS.500/08/2022 Perihal Hasil Penghitungan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022). Pada tahun 2023 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara turun menjadi 1,50 % dengan jumlah 14,01 ribu jiwa.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, setiap Kabupaten/Kota telah membentuk TKPK termasuk Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 050/90 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka menjalankan perannya TKPK tentunya harus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dari berbagai pihak di tingkat Pusat/Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa baik dengan institusi pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, media massa, maupun organisasi/kelompok masyarakat. Melihat tugas dan perannya, keberadaan TKPK memiliki arti strategis, namun demikian ternyata peran TKPK yang sudah terbentuk kerjanya belum optimal, penanganan kemiskinan di Kab. Banjarnegara belum efektif.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan baik oleh pemerintah, lembaga sosial masyarakat (di antaranya lembaga zakat) maupun perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam hal program CSR, meski telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik seiring dengan kesadaran perusahaan yang semakin baik, namun dikarenakan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaannya, mengakibatkan program CSR sangat variatif, berjangka pendek, dan cenderung mengikuti selera pemilik dana. Sementara pada program zakat yang diharapkan dapat menjadi program abadi terkait dengan pemenuhan kewajiban agama, juga belum mampu mengatasi kemiskinan secara optimal. Masyarakat lebih suka membayarkan kewajiban zakatnya secara langsung sehingga mengakibatkan jumlah dana yang dikelola oleh lembaga zakat relatif terbatas.

Permasalahan-permasalahan kemiskinan dan penanganan kemiskinan di atas mendorong dilakukannya evaluasi kinerja program pengentasan kemiskinan secara komprehensif termasuk peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, sebagai landasan upaya Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan guna Efektifitas Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

## 1.2. Permasalahan

*Policy paper* ini mengkaji peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang belum optimal dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara terkait peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diantaranya:

1. **Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi**, menurut BPS (2023) pada tahun 2023 sebesar 14,90% (masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah 10,77% dan Nasional 9,36%).
2. Keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan belum terjamin sampai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, hal ini karena Peran Camat dan Kepala Desa/Lurah belum diakomodir dalam kelembagaan TKPK yakni **belum dibentuk TKPK tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan** sebagai kepanjangan TKPK Kabupaten yang diharapkan bisa lebih operasional dan lebih teknis. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berperan sebagai ketua/koordinator tim yang mengkoordinasikan berbagai OPD dan pihak terkait lainnya di daerah. Disamping itu, dengan status sebagai lembaga *ad-hoc* maka kinerja TKPK kurang optimal karena personilnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab di OPD masing-masing. Sebagaimana Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 050/90 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjarnegara.
3. **Data kemiskinan *By Name by Address* yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil keluarga miskin**, sehingga intervensi penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil tidak bisa tepat. Sebagaimana data yang tersedia pada OPD Disperindagkop UKM selaku anggota TKPK tahun 2023 hanya jumlah UMKM yang ada di Kab. Banjarnegara (sebanyak 28.913 dengan UKM binaan pada tahun 2022 sebanyak 290 UKM). Meskipun terkait pendataan kemiskinan telah mengacu pada Permensos RI No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, serta Kepmensos RI No. 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta

Verifikasi dan Validasi, dimana format pendataannya tidak sampai identifikasi permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil keluarga miskin.

Program penanganan kemiskinan lebih banyak pada program pemenuhan layanan dasar, sedangkan **program pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan usaha mikro kecil keluarga miskin yang dilaksanakan oleh OPD selaku anggota TKPK relatif kecil**. Hal ini diperkuat temuan dari Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Laporan Nomor: PE.09.03/LHP-348/PW11/3.2/2023 tanggal 27 Juni 2023, dilaporkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Sehingga untuk mengatasi kemiskinan diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar baik berupa kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan Pendidikan. Pemenuhan ini semua untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan *policy paper* ini yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang kemiskinan dan penanganan kemiskinan serta peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan guna merumuskan rekomendasi kebijakan optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan penulisan *policy paper* ini adalah mengetahui permasalahan belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara serta menyusun rekomendasi kebijakan optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *policy paper* ini terkait perkembangan kemiskinan dan upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara serta permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi tindak lanjut.

### 1.5. Manfaat

*Policy paper* ini akan sangat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara serta stakeholder dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan optimalisasi peran TKPK guna efektifitas penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

### 1.6. Dampak Optimalisasi Peran TKPK

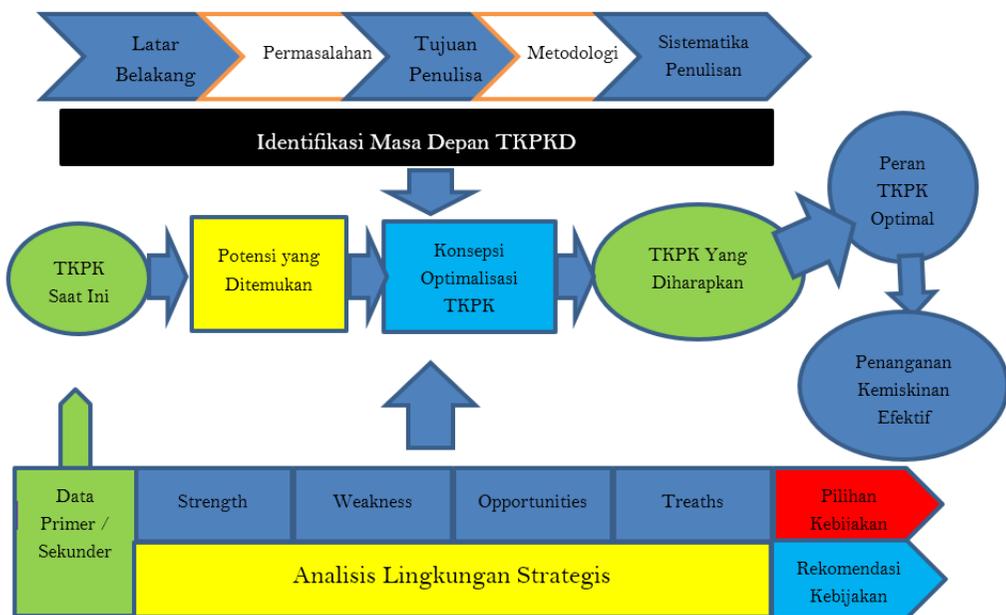
Optimalisasi peran TKPK secara umum akan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan pemerintah, dampak yang diharapkan adalah efisiensi dan efektifitas program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilaksanakan sehingga tepat sasaran, tepat manfaat, tepat mutu, dan tepat anggaran serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.

### 1.7. Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pikir penyusunan *policy paper* ini berangkat dari latar belakang kondisi

kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara yang masih tinggi, padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk penanganan kemiskinan ini serta dijumpai beberapa permasalahan dalam penanganan kemiskinan. Dengan kondisi tersebut perlu langkah strategis dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara sehingga diharapkan akan dapat efektif.

Dengan mencermati kondisi lingkungan strategis baik faktor internal maupun eksternal kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan analisis dengan pendekatan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam upaya Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Disamping itu juga memperhatikan pilihan kebijakan yang ada, kondisi TKPK saat ini serta kondisi yang diharapkan yang akan datang maka dirumuskan rekomendasi kebijakan Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan guna Efektifitas Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, dengan alur pola pikir sebagaimana gambar 2.



**Gambar 2.** Pola Pikir Optimalisasi Peran TKPK Untuk Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kemiskinan

## II. Metode

### 2.1. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan *policy paper* ini adalah data yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu menyangkut aspek kebijakan, strategi maupun program penanggulangan kemiskinan, yang meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa perantara, melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau diskusi kelompok terfokus (FGD). Dalam penelitian kualitatif, data primer sering diperoleh di lingkungan alami, seperti dalam situasi sehari-hari yang melibatkan interaksi langsung atau FGD, guna mengumpulkan informasi yang mendalam terkait konteks penelitian (Sugiyono, 2013 dalam Fadilla & Wulandari, 2023). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data diperoleh melalui interaksi

langsung dengan karyawan OPD anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan pihak-pihak terkait lainnya. Penggunaan data primer ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja TKPK, termasuk aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode, baik untuk keperluan komersial maupun nonkomersial (Sugiyono, 2013 dalam Fadilla & Wulandari, 2023). Sumber data sekunder bisa berasal dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta dari buku, laporan, jurnal, atau sumber informasi lainnya yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan TKPK.

## 2.2. Analisis

Dalam rangka Optimalisasi peran TKPK guna Efektifitas Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara diperlukan strategi sebagai alat/cara untuk mencapai tujuan. Untuk merumuskan strategi apa yang akan diambil untuk Optimalisasi peran TKPK dilakukan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal berupa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*).

Analisis SWOT bertujuan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan (Victor, 2020 dalam Alam, W dkk, 2024). Ini adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu proyek atau strategi tertentu, seperti dalam memetakan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman (Ricki Febriansyah, 2022 dalam Alam, W dkk, 2024).

Pada konteks yang lebih spesifik, seperti Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Banjarnegara, analisis SWOT dilakukan untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, SWOT membantu menentukan strategi optimal dengan melihat faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) untuk membentuk strategi yang paling sesuai.

Menurut Nurcahya E & Benny M.A. 2020, Teknik analisis data dengan menggunakan SWOT Analisis yaitu mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari berbagai informasi untuk menemukan tujuan penelitian ini. Penggunaan analisis SWOT karena merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi, baik bagi perusahaan maupun pemerintah daerah. Jadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi, dalam konteks artikel ini ditujukan untuk menilai kualitas layanan pemerintah daerah, sehingga diharapkan mampu meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu pemerintah daerah serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Model SWOT/TOWS memungkinkan penggabungan faktor-faktor ini dalam formulasi strategi yang efektif, memberikan empat alternatif strategi utama: SO (memanfaatkan kekuatan dan peluang), ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman), WO (mengggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan), dan WT (mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman). Keunggulan dari matriks ini adalah kemampuannya menggabungkan faktor internal dan eksternal secara logis, sehingga menghasilkan strategi yang lebih terarah dan terintegrasi.

## Tahap I

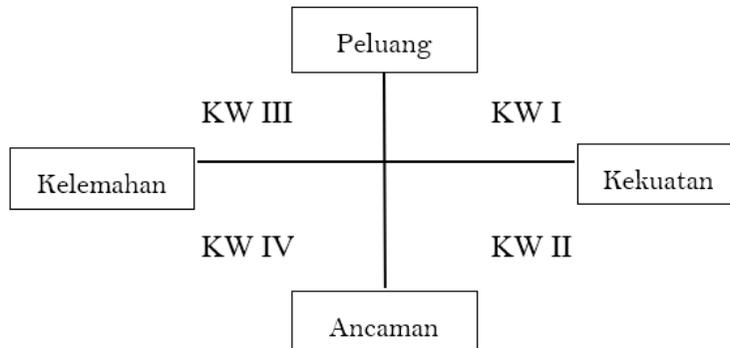
Analisis pada tahap ini menggunakan matrik IFAS dan matrik EFAS untuk menganalisis lingkungan eksternal maupun lingkungan internal sebagai berikut:

1. Matrik IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)  
Setelah faktor-faktor strategis internal diidentifikasi maka selanjutnya disusun tabel IFAS untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka kekuatan dan kelemahan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. Buatlah daftar *critical success factors*, mencakup faktor kekuatan dan kelemahannya.
  - b. Beri bobot nilai antara 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting) bagi masing-masing faktor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memiliki peran yang paling besar pada prestasi organisasi diberi nilai tertinggi, demikian pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus 1.0.
  - c. Beri *rating* (nilai) antara 1 sampai 5 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kekuatan/kelemahan yang sangat besar (*rating* = 5), kekuatan/kelemahan yang besar (*rating* = 4), kekuatan/kelemahan yang sedang (*rating* = 3), kekuatan/kelemahan yang kecil (*rating* = 2), dan kekuatan/kelemahan yang sangat kecil (*rating* = 1).
  - d. Kalikan bobot dengan *rating* dari masing-masing faktor untuk menentukan skornya. Jumlahkan total skor masing-masing *variabel*. Nilainya merupakan nilai bagi organisasi tersebut dari sisi IFAS Matrik.
  - e. Membuat tabel IFAS Matrik.
2. Matrik EFAS (*External Factors Analysis Summary*).  
Setelah faktor-faktor strategi eksternal perusahaan diidentifikasi, suatu tabel EFAS (*External Strategic Factors analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis eksternal tersebut dalam kerangka peluang dan ancaman. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:
  - a. Buatlah *critical success factors* yang mencakup peluang dan ancaman.
  - b. Tentukan bobot *critical success factors* tadi dengan skala mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Total dari seluruh bobot harus sama dengan 1.0.
  - c. Setiap *critical success factors* diberi *rating* (nilai) antara 1 sampai 5, dimana: Rating 5 = peluang/ancaman sangat besar, Rating 4 = peluang/ancaman besar, Rating 3 = peluang/ancaman sedang, Rating 2 = peluang/ancaman kecil, Rating 1 = peluang/ancaman sangat kecil.
  - d. Kalikan masing-masing nilai bobot dengan nilai *rating* (bobot X *rating*) untuk mendapatkan skor. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan total skor.
  - e. Membuat tabel EFAS Matrik.

## Tahap II

Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif strategi digunakan alat analisis berupa diagram kartesius dalam kerangka analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threats*), dengan cara menyelisihkan antar faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta faktor peluang dan ancaman. Untuk merumuskan strategi didasarkan pada logika dengan memaksimalkan kekuatan

(*Strengths*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threats*). Selanjutnya dibuat diagram kartesius yang digunakan untuk menentukan strategi Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan bentuk sebagaimana gambar 3.



**Gambar 3.** Diagram Kartesius Posisi Strategis TKPK.

Keterangan:

Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, dimana lembaga tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijaksanaan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, lembaga ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Kuadran III: Lembaga menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal, Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal lembaga sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran IV: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, lembaga tersebut menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal.

### Tahap III

Tahap ini menggunakan input dari informasi tahap I untuk mengevaluasikan secara obyektif strategi-strategi alternatif dari hasil tahap II, sehingga memberikan basis obyektif bagi pemilihan strategi-strategi yang paling spesifik. Melalui diagram kartesius pada tahap II, posisi TKPK dapat diketahui maka strategi yang akan diterapkan dapat diketahui karena pada masing-masing kuadran dalam diagram kartesius sudah mempunyai strategi yang dapat langsung dipilih yang sesuai dengan letak posisi kuadran dari TKPK.

Dengan analisis SWOT dapat dirumuskan potensi yang ditemukan, konsepsi Optimalisasi peran TKPK, TKPK yang diharapkan, pada akhirnya akan terwujud Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara yang efektif.

### 2.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan *Policy Paper* ini meliputi Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Maksud dan Tujuan Penulisan, Manfaat, Dampak Optimalisasi Peran

TKPK, Kerangka Pemikiran, Metodologi, Sistematika Penulisan; Bab II Analisis Dan Pembahasan Masalah, terdiri dari Penanganan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Potensi Yang Ditemukan, Konsepsi Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Yang Diharapkan; Bab III Pilihan Kebijakan, terdiri dari Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan dan TKPK Kecamatan, Pendataan Kemiskinan *by name by address* (BNBA) beserta Identifikasi Permasalahan yang dihadapi UMK, serta Pemberdayaan UMK keluarga miskin; Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan.

### III. Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas penanganan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, potensi yang ditemukan, konsepsi optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diharapkan.

#### 3.1. Penanganan Kemiskinan

Secara Nasional menurut TNP2K (2011), program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah yang meliputi penetapan sasaran, perencanaan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat Kecamatan serta di tingkat Desa/Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mewajibkan seluruh Kepala Desa untuk mendahulukan Program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) pada APBDDesa tahun 2020 s.d. 2022 dalam bentuk kegiatan khusus dari Dana Desa berupa: Pengadaan alat bantu bagi disabilitas; Pencegahan dan Penanganan Stunting; Pembangunan Jambanisasi; Kegiatan Padat Karya Tunai; Pemugaran RTLH setiap Desa minimal 10 Unit; dan Fasilitas Masyarakat Miskin Secara Partisipatif di Desa. Melakukan kolaborasi dan komitmen penanggulangan kemiskinan bersama lintas sektoral yakni: BAZNAS, BUMN, BUMD dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pendampingan khusus di Desa Prioritas, yakni: pada tahun 2020 untuk 20 Desa, tahun 2021 untuk 20 Desa, dan tahun 2022 untuk 18 Desa. Pada tahun 2023 ditetapkan 44 Desa Lokus Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Surat Keputusan

Bupati Banjarnegara Nomor: 050/209 Th 2023 Tentang Penetapan 44 Desa Lokus Kemiskinan Kab. Banjarnegara.

### **Gerakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah “Caping Nanda”**

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen terhadap penanganan dan penanggulangan kemiskinan melalui strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yaitu bagaimana meringankan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Implementasi dari komitmen tersebut antara lain adalah dengan dilaksanakannya program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, yaitu program percepatan penurunan kemiskinan melalui pendampingan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi minimal satu Desa Dampingan. Terobosan ‘**Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan**’ ini sebagai upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dikenal dengan “**Caping Nanda**”. Sebagaimana Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 400.9.14/7/BUPATI/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Pelaksanaan Gerakan “Caping Nanda” Desa Dampingan Tahun 2023.

Maksud gerakan ini adalah sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada lokasi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dengan tujuan Pemetaan potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa; memecahkan permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan di desa dan berupaya mengintervensi dengan cara kolaborasi berjenjang.

Gerakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Banjarnegara yang dikenal dengan “Caping Nanda” melalui “Satu Perangkat Daerah Minimal Satu Desa Dampingan” membutuhkan komitmen bersama guna menumbuhkan semangat gotong royong dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. Komitmen tersebut dibangun dan ditumbuhkan secara berkesinambungan oleh semua Perangkat Daerah pelaksana bersama dengan Camat, Pemerintah Desa, *stakeholder* terkait, swasta, dan masyarakat Desa. Gerakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah “Caping Nanda” melalui “Satu Perangkat Daerah Minimal Satu Desa Dampingan” dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2022-2026.

Peran OPD dalam Kegiatan Desa Dampingan yakni sebagai pembina dan fasilitator dengan secara aktif melibatkan para pihak baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, para pendamping desa, masyarakat di Desa Dampingan, serta dunia usaha (perusahaan, BUMN, BUMD), Baznas dan perguruan tinggi.

Langkah pendampingan meliputi:

1. Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah lain atau stakeholder lainnya;
2. Mendorong/mobilisasi peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, BUMN dan BUMD untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan;
3. Melaksanakan assessment dan menggali potensi yang ada guna pelaksanaan kegiatan Desa Dampingan;
4. Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti Filantropi, BAZNAS, BAZDA, Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau penggalangan donasi di lingkungan kerja.
5. Menjalani koordinasi dan Kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan pendampingan dalam perbaikan/updating “DTKS versi Jateng” di Desa Dampingan.

7. Pendampingan dalam optimalisasi pemanfaatan Dana Desa secara efektif dan efisien untuk pemberdayaan dan pembangunan desa.
8. Fasilitasi Pengembangan BUMDES untuk mengembangkan potensi lokal Desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa.

Gerakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah “Caping Nanda” melalui “Satu Perangkat Daerah Minimal Satu Desa Dampingan” dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Bupati sebagai Pembina, dan Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan program/kegiatan di desa dampingan. Perangkat Daerah secara teknis melakukan koordinasi secara intensif dengan Camat setempat.

Layanan Kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian dan segera diupayakan intervensi meliputi 8 (delapan) layanan sebagaimana gambar 4.



**Gambar 4.** Intervensi Layanan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam perkembangannya Layanan Kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian dan segera diupayakan intervensi sampai tahun 2023 sebagaimana tabel 2.

**Tabel 2.** Intervensi 8 Layanan Dasar Di Kabupaten Banjarnegara (Per 28 Feb 2024)

NO	URAIAN	KEBUTUHAN	DIINTERVENSI	SISA
1	RTLH	482	308	174
2	LISTRİK	1.372	1.337	35
3	SAB	3.676	1.438	2.238
4	JAMBAN	2.472	1.639	833
5	TIDAK BEKERJA	4.691	4.648	43
6	ATS	1.532	843	689
7	DISABILITAS	285	285	0
8	RESIKO STUNTING	221	221	0

Sumber: Baperlitbang

Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, target Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 sebesar 14,6 s/d 14 sedangkan realisasi sebesar 15,2%. Adapun amanat Peraturan Bupati Banjarnegara No. 14

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, target Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebesar 15,64 s/d 14,46 sedangkan realisasi sebesar 14,9%.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045, dengan gambaran diantaranya Kemiskinan menuju nol persen yakni pada kisaran 0,5-0,8 persen. Sedangkan target kemiskinan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 dalam Rancangan RPJPD 2025-2045 masih tinggi yakni sebesar 12,24 persen.

### **3.2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

Dasar hukum pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yaitu:

1. Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (pasal 7 ayat 1), Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (pasal 7 ayat 2)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berperan sebagai ketua/koordinator tim yang mengkoordinasikan berbagai OPD dan pihak terkait lainnya di daerah berkaitan beberapa hal yaitu:

1. Koordinasi, terutama dalam penyusunan RPKD; Penyusunan Renstra OPD; Perancangan RPKD; Penyusunan Renja OPD. Dari peran koordinasi ini diharapkan program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan.
2. Pengendalian, terkait pengendalian pemantauan dan evaluasi program oleh OPD; Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik; Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat. Dengan pengendalian diharapkan terjadi umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), melalui Keputusan Bupati Nomor: 415/615 Tahun 2010. Tugas Tim dimaksud adalah Melakukan koordinasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Banjarnegara, mengendalikan dan mendorong percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah serta melakukan monitoring, pengendalian dan penanganan atas pengaduan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kondisi dan situasi penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mengoptimalkan kinerja TKPK, maka dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan TKPK, yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 050/318 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian dilakukan perubahan kembali dengan mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 050/710 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian direvisi dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 050/90 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjarnegara.

TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Banjarnegara. Dalam melaksanakan tugas, TKPK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten.
2. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan.
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan.
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka mendorong optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, TKPK menjadwalkan rapat koordinasi tingkat Kabupaten sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam setahun sebagaimana amanat peraturan Menteri dalam negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dibentuk TKPK Kabupaten Banjarnegara namun perjalanan TKPK sepertinya belum memberikan kontribusi yang optimal dalam penanganan kemiskinan. Selain minimnya ketersediaan data dan informasi yang valid dan aktual tentang sasaran keluarga miskin sehingga perencanaan program kegiatan penanganan kemiskinan kurang tepat serta tidak tepatnya pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan baik sasaran maupun manfaat dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selaku anggota TKPK.

Kondisi TKPK dapat diidentifikasi dari mekanisme penyelenggaraan TKPK, pola hubungan TKPK dengan mitra TKPK, serta pola hubungan TKPK Kabupaten dengan TKPK Provinsi dan TKPK Pusat terutama dari keterlibatan dan peranannya dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

1. Mekanisme penyelenggaraan TKPK.
  - a) Status TKPK sebagai Lembaga non struktural, dengan tugas dan fungsi yang jelas.

- b) Program kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar terkait pelayanan kebutuhan dasar.
  - c) TKPK lembaga *ad hoc* yang anggotanya dari OPD yang memiliki kesibukan masing-masing sesuai tugas OPD.
  - d) TKPK memiliki Sekretariat yang mendukung kelancaran tugas TKPK.  
Sekretariat TKPK memiliki tugas:
    - 1) Memberikan dukungan administrasi teknis;
    - 2) Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
    - 3) Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
    - 4) Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
2. Pola hubungan TKPK dengan Mitra TKPK.
    - a) Koordinasi yang kurang intensif antara TKPK dengan mitra,
    - b) Kurangnya inovasi percepatan penurunan kemiskinan.
    - c) Prioritas program kegiatan OPD anggota TKPK belum sepenuhnya mengacu rencana aksi serta RPKD.
  3. Pola hubungan TKPK Kabupaten dengan TKPK Provinsi dan TKPK Pusat.
    - a) Kurangnya koordinasi TKPK Kabupaten dengan TKPK Provinsi dan TNP2K termasuk dengan K/L.
    - b) Kurangnya keterlibatan dan peran TKPK dalam perencanaan dan evaluasi penanganan kemiskinan.
    - c) Kurang intensifnya pendampingan TKPK dan penanganan kemiskinan.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 510.001.204.877,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 492.657.837.094,- dengan rincian strategi Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

1. Menurunkan Beban Pengeluaran, sebesar Rp 221.756.889.320,- terdiri dari Program Rehabilitasi Sosial, Penanganan Bencana, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Pendaftaran Penduduk, Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengadaan Obat Vaksin, Pengelolaan Pendidikan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Hubungan Industrial.
2. Meningkatkan Pendapatan, sebesar Rp 29.198.773.585,- terdiri dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Sosial, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, KUBE, Penempatan Tenaga Kerja.
3. Meminimalkan Kantong Kemiskinan, sebesar Rp 241.702.174.189,- terdiri dari Program Perlindungan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Penanganan Bencana, Rehabilitasi Sosial, PKH, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana, Penataan Desa, Peningkatan Kerjasama

Desa, Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Pengembangan UMKM, Pemberdayaan UMKM, Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Pembinaan Perpustakaan, Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kawasan Permukiman Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pengembangan Perumahan, Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ.

Tantangan dalam kelembagaan TKPK ke depan adalah bagaimana mengefektifkan kinerja Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu; dan Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; serta mengoptimalkan peran swasta dan memperkuat peran Camat dan Kepala Desa / Lurah dalam kelembagaan TKPK sehingga semua unsur kelembagaan bisa maksimal dalam melakukan fungsi koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan hingga ke tingkat kecamatan dan desa / kelurahan. Dengan status sebagai lembaga ad-hoc maka kinerja TKPK kurang optimal karena personilnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab di OPD masing-masing.

### 3.3. Potensi yang Ditemukan

Fakta-fakta objektif tentang kondisi saat ini yang berkaitan dengan peran TKPK yang membawa pengaruh terhadap efektifitas penanganan kemiskinan akan dianalisis dengan metoda SWOT.

Dari kondisi TKPK Kabupaten Banjarnegara dapat dikelompokkan masing-masing variabel *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats*. Variabel ini merupakan potensi yang digunakan untuk menyusun konsepsi optimalisasi peran TKPK yang membawa pengaruh terhadap efektifitas penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

**Strength.** Hal-hal yang menjadi kekuatan TKPK yang dimiliki, kekuatan ini yang akan dikembangkan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Adapun variabel kekuatan yang ada sebagaimana Tabel 3.

**Tabel 3.** *Strength* (Kekuatan) TKPK

No.	Variabel	Rating	Bobot	Skor
1	Memiliki anggota TKPK dari OPD yang berkualitas tinggi.	4	0,20	0,80
2	Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sesuai peraturan yang ada.	3	0,15	0,45
3	Memiliki peran yang strategis dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanganan kemiskinan.	5	0,25	1,25
4	Memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan (Kepala Daerah).	4	0,20	0,80
5	Memiliki Sekretariat yang siap mendukung kelancaran tugas TKPK.	4	0,20	0,80
	Jumlah	20	1	4,10

**Sumber:** Hasil olahan Peneliti

**Weakness.** Setiap organisasi dalam menjalankan kegiatannya selain terdapat kekuatan-kekuatan, juga terdapat kelemahan-kelemahan. Organisasi harus dapat menganalisis setiap kelemahan yang ada dan berusaha mengurangi dan bahkan berusaha menghilangkannya. Setiap kelemahan yang ada harus diidentifikasi agar organisasi dapat menutup kelemahan tersebut dengan kekuatan yang ada. Berikut ini diuraikan faktor-faktor kelemahan yang ada pada TKPK Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Tabel 4.

**Tabel 4.** *Weakness* (Kelemahan) TKPK

No.	Variabel	Rating	Bobot	Skor
1	TKPK yang dibentuk baru di tingkat Kabupaten, belum dibentuk TKPK sampai tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan.	5	0,23	1,15
2	Anggota TKPK terdiri dari OPD yang memiliki kesibukan masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.	3	0,13	0,39
3	Koordinasi yang kurang intensif antar OPD anggota TKPK Kabupaten maupun dengan TKPK Provinsi serta TNP2K untuk mendukung keterpaduan Program Kegiatan.	4	0,18	0,72
4	Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPK lebih banyak pada pelayanan kebutuhan dasar, sedangkan pemberdayaan masyarakat UMK keluarga miskin sangat sedikit.	5	0,23	1,15
5	TKPK tidak memiliki data yang valid dan aktual BNBA kemiskinan dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi UMK.	5	0,23	1,15
Jumlah		22	1	4,56

**Sumber:** Hasil olahan Peneliti

**Opportunities.** Setiap organisasi tentunya mempunyai peluang untuk berkembang dan maju, sehingga organisasi harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada tersebut. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas peluang yang dimiliki TKPK Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Tabel 5.

**Tabel 5.** *Opportunities* (Peluang) TKPK

No.	Variabel	Rating	Bobot	Skor
1	Memiliki jaringan TKPK di seluruh Provinsi dan Kabupaten / Kota.	3	0,16	0,48
2	Dukungan stakeholder diluar anggota TKPK (Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, BAZ / Lazis dll) terhadap penanganan kemiskinan.	5	0,26	1,30
3	Dukungan TKPK Provinsi dan TNP2K.	3	0,16	0,48
4	Potensi SDA Kabupaten Banjarnegara melimpah.	4	0,21	0,84
5	Peluang pasar produk UMK berbasis potensi lokal.	4	0,21	0,84
Jumlah		19	1	3,94

**Sumber:** Hasil olahan Peneliti

**Threats.** Disamping peluang, organisasi juga menghadapi ancaman, terlebih dengan semakin banyaknya organisasi yang didirikan yang bergerak dalam bidang sejenis. Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi TKPK Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Tabel 6.

**Tabel 6.** *Threats* (Ancaman) TKPK

No.	Variabel	Rating	Bobot	Skor
1	Masih rendahnya budaya malu dianggap miskin.	3	0,17	0,51
2	Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.	3	0,17	0,51
3	Masih rendahnya kualitas SDM keluarga miskin.	4	0,22	0,88
4	Program kegiatan dari stakeholder / mitra cenderung parsial, tidak terpadu dan berkesinambungan.	5	0,27	1,35
5	Terbatasnya dukungan APBD untuk operasional TKPK.	3	0,17	0,51
Jumlah		18	1	3,76

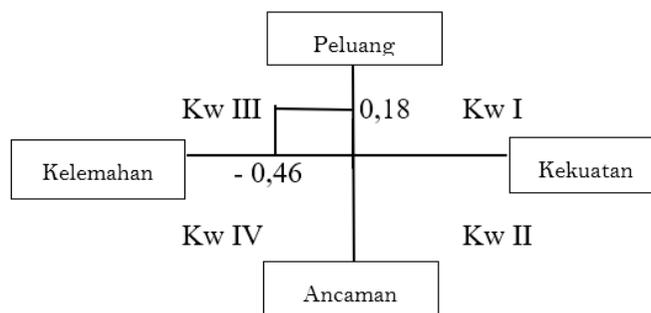
**Sumber:** Hasil olahan Peneliti

Setelah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan TKPK, baik faktor-faktor dari dalam maupun faktor-faktor dari luar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kekuatan TKPK berada pada posisi nilai sebesar 4,10 dan untuk faktor kelemahan nilainya adalah 4,56. Sedangkan faktor peluang dengan nilai sebesar 3,94 dan faktor ancaman yang dihadapi dengan nilai 3,76.

Untuk menentukan strategi dilakukan dengan analisis SWOT dengan menggunakan diagram Kartesius dari selisih antara faktor kekuatan dan kelemahan serta faktor peluang dan ancaman.

- **Kekuatan - Kelemahan** =  $4,10 - 4,56 = - 0,46$
- **Peluang - Ancaman** =  $3,94 - 3,76 = 0,18$

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil bahwa posisi TKPK Kabupaten Banjarnegara berada dalam Kuadran III (tiga) sebagaimana gambar 5, TKPK menghadapi peluang yang besar namun di lain pihak juga menghadapi beberapa kendala berupa kelemahan internal. Fokus strategi yang harus diterapkan adalah meminimalkan kelemahan-kelemahan internal sehingga dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada.



**Gambar 5.** Posisi TKPK Pada Diagram Kartesius.

### 3.4. Konsepsi Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Telah diketahui bahwa posisi TKPK berada pada Kuadran III, dengan fokus strategi meminimalkan kelemahan-kelemahan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sehingga strategi yang diterapkan untuk Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan dan TKPK Kecamatan guna mendukung kelancaran dan keberhasilan penanganan kemiskinan.
2. Penunjukan personil OPD sebagai anggota tetap TKPK.
3. Koordinasi yang intensif antar OPD anggota TKPK Kabupaten maupun dengan TKPK Provinsi serta TNP2K baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi guna mendukung keterpaduan dan kesinambungan Program Kegiatan penanganan kemiskinan.
4. TKPK mendorong dan memfasilitasi OPD terkait di dukung TKPK Desa/Kelurahan untuk menyiapkan data yang valid dan aktual BNBA kemiskinan lengkap dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi UMK.
5. Penguatan program kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya UMK keluarga miskin oleh TKPK Kabupaten Banjarnegara.
6. Mengoptimalkan kerjasama TKPK Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jateng.
7. Mengoptimalkan dukungan stakeholder diluar anggota TKPK (Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, BAZ/Lazis dll) terhadap penanganan kemiskinan.
8. Mengoptimalkan dukungan TKPK Provinsi dan TNP2K dalam penanganan kemiskinan.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan Potensi SDA Kabupaten Banjarnegara.

Mengembangkan pemasaran produk UMK berbasis potensi lokal serta komitmen semua pihak untuk menggunakan / memanfaatkan produk lokal UMK.

### 3.5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Yang Diharapkan

Dengan strategi Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui fokus meminimalkan kelemahan-kelemahan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga TKPK yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran TKPK dalam koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sampai di tingkat Desa/Kelurahan dengan **pembentukan TKPK sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan**.
2. Meningkatnya peran TKPK dalam mewujudkan **tersedianya data Kemiskinan *by name by address* (BNBA) berikut Identifikasi Permasalahan kemiskinan khususnya permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin**. Perencanaan dan penganggaran penanganan kemiskinan, harus didukung dengan data yang valid dan aktual serta lengkap dengan informasi permasalahan yang dihadapi berbasis data terpadu (BDT) di tingkat desa. Dengan tersedianya data penduduk miskin *by name by address* (BNBA) lengkap dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin diharapkan intervensi penanganan kemiskinan dan pemberdayaan UMK keluarga miskin akan tepat sasaran dan tepat manfaat, menjawab permasalahan yang dihadapi termasuk permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin.
3. Meningkatnya peran TKPK dalam **Program Kegiatan Pemberdayaan UMK Keluarga Miskin** yang dilakukan oleh OPD anggota TKPK dengan berbasis data dan informasi permasalahan yang dihadapi UMK, sehingga diharapkan UMK mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin.

#### IV. Pemilihan Kebijakan

Dalam Bab ini dibahas pilihan kebijakan Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diambil, meliputi Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan dan TKPK Kecamatan, Pendataan Kemiskinan *by name by address* (BNBA) berikut Identifikasi Permasalahan yang dihadapi UMK, serta Pemberdayaan UMK keluarga miskin. Pilihan kebijakan ini dapat diterapkan untuk semua Kabupaten/Kota di Indonesia, tidak hanya di wilayah lokasi kajian terutama bagi Kabupaten/Kota yang belum menerapkan kebijakan ini.

##### 4.1. Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan dan TKPK Kecamatan.

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah dengan kemiskinan tinggi di Jawa Tengah, dengan permasalahan yang kompleks yang tidak mungkin dapat ditangani secara efektif jika hanya mengandalkan TKPK Kabupaten yang anggotanya terdiri dari OPD Kabupaten yang memiliki kesibukan masing-masing sesuai tugasnya.

Meningkatnya peran TKPK dalam koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sampai di tingkat Desa/Kelurahan dengan mengembangkan TKPK tidak hanya dibentuk di tingkat Kabupaten juga membentuk TKPK sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Penguatan peran TKPK dilakukan melalui perluasan struktur kelembagaan hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa. Inisiatif ini dilakukan karena menyadari sangat tingginya angka kemiskinan dan kompleksnya permasalahan yang tidak dapat ditangani secara efektif jika hanya mengandalkan kendali dari tingkat Kabupaten.

Langkah konkrit untuk penguatan peran TKPK Kabupaten, diantaranya dengan penguatan peran Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan selaku satuan kerja terkecil, dengan pembentukan TKPK tingkat Kecamatan dan TKPK tingkat Desa/Kelurahan untuk merumuskan kembali tentang kemiskinan, inventarisasi dan identifikasi data kemiskinan, dan merencanakan/mengusulkan program kegiatan penanganan kemiskinan yang disepakati melalui musyawarah Desa (Musdes) serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan di Desa.

Upaya penanganan kemiskinan tidak akan optimal apabila dilakukan secara parsial hanya oleh salah satu pihak, perlu kolaborasi/keterpaduan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta terutama dunia usaha, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun media massa. Kerjasama tidak hanya di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten tapi juga di tingkat paling rendah yakni Desa/Kelurahan.

TKPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, dibentuk dan berada dibawah tanggung jawab Camat. TKPK Kecamatan mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan. TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai Koordinator TKPK Desa/Kelurahan, yang secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten. TKPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan, dibentuk dan berada dibawah tanggung jawab Kepala Desa/Lurah. TKPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan. TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

#### 4.2. Pendataan Kemiskinan *by name by address* (BNBA) Berikut Identifikasi Permasalahan UMK Keluarga Miskin.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk di dalamnya perencanaan program pengentasan kemiskinan diperlukan data yang valid dan aktual, data kemiskinan *by name by address* (BNBA) serta informasi permasalahan penyebab kemiskinan maupun permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin. Dukungan Pemerintah baik pusat maupun Daerah sangat diharapkan melalui K/L maupun OPD untuk melakukan *updating* data kemiskinan dan UMK keluarga miskin dengan mengoptimalkan peran TKPK melalui OPD serta melibatkan TKPK Desa / Kelurahan yang tahu persis kondisi dilapangan. Data tidak hanya menyajikan jumlah keluarga miskin dan jumlah UMK namun juga dilengkapi dengan informasi penyebab kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi UMK, sehingga perencanaan dan intervensi penanganannya dapat tepat. Permasalahan yang dihadapi oleh UMK sangat beragam, berbeda-beda antara UMK yang satu dengan UMK yang lain diantaranya masalah SDM, Teknologi, Pemasaran, Permodalan, Kemitraan, ataupun Iklim Usaha yang kurang Kondusif.

Kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektorial dengan Kewenangan Kabupaten / Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektorial di lingkup Daerah kabupaten / kota. Tantangan penyelenggaraan urusan statistik kedepan adalah mengenai implementasi satu data dalam semua proses pembangunan. Hal tersebut menjadi tantangan karena memang salah satu permasalahan klasik dalam penyediaan data pendukung pembangunan adalah belum validnya data dan adanya perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi yang lain.

#### 4.3. Pemberdayaan UMK Keluarga Miskin

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas sektor dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden tersebut terdapat 4 strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yaitu: 1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. **mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil**; 4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan diantaranya terkait bidang **Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**; serta bidang **Pengembangan UMKM**. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dijelaskan berdasarkan modal usaha yang termasuk kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan hasil penjualan tahunan kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00.

Penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat pengentasan kemiskinan. Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Februari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro.

Pemberdayaan penduduk miskin ditujukan untuk penduduk miskin produktif yang memiliki usaha skala mikro dan kecil, yang untuk keberlanjutan dan pengembangannya perlu difasilitasi. Upaya pemberdayaan UMK harus memperhatikan permasalahan yang dihadapi masing-masing UMK dari berbagai lapangan usaha yang dijalani. Permasalahan yang dihadapi oleh UMK sangat beragam, berbeda-beda antara UMK yang satu dengan UMK yang lain diantaranya masalah SDM, Teknologi, Pemasaran, Permodalan, Kemitraan, ataupun Iklim Usaha yang kurang Kondusif.

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh UMK maka intervensinya dapat dilakukan melalui berbagai upaya fasilitasi diantaranya pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan, Pengembangan Teknologi dengan bantuan peralatan, Pengembangan Pemasaran melalui bantuan kemasan produk dan promosi, Pengembangan Permodalan dengan pinjaman modal berbunga rendah dan mudah, Pengembangan Kemitraan dengan fasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak baik dunia usaha maupun perguruan tinggi, Pengembangan Iklim Usaha yang kurang Kondusif diantaranya dengan berbagai kebijakan ataupun regulasi yang memberi kemudahan ataupun fasilitas bagi UMK.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan mendapat perhatian serius khususnya bagi pemerintah daerah. Karena UMKM menjadi sektor yang mampu membangkitkan kembali perekonomian. Hal ini terbukti saat terjadi pandemi, sektor ini tetap bertahan dan menjadi penopang perekonomian daerah dan nasional.

Berbasis data yang valid dan aktual serta lengkap dengan informasi permasalahan yang dihadapi UMK maka program pemberdayaan masyarakat khususnya UMK keluarga miskin diperbesar agar UMK keluarga miskin yang jumlahnya cukup banyak diharapkan dapat meningkatkan usahanya, pendapatan dan kesejahteraannya serta mentas dari kemiskinan. Disamping itu juga diharapkan akan meningkatkan kemandirian UMK dan mengurangi ketergantungan keluarga miskin akan kecukupan layanan kebutuhan dasar.

## **V. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **5.1. Kesimpulan**

Keberadaan TKPK di Kabupaten Banjarnegara belum optimal dalam mendukung efektivitas penanganan kemiskinan, sebagaimana mandat yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada TKPK.

Oleh karena itu perlu diambil kebijakan Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan guna meningkatkan Efektivitas Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara terutama melalui Pembentukan TKPK Kecamatan dan TKPK

Desa/Kelurahan, Pendataan Kemiskinan *by name by address* (BNBA) berikut Identifikasi Permasalahan, dan Pemberdayaan UMK keluarga miskin.

## 5.2. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah pusat dalam upaya optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan guna Efektifitas Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Pemerintah melalui Kemendagri mengeluarkan kebijakan pembentukan TKPK tidak hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota namun sampai Kecamatan dengan keputusan Camat hingga Desa/Kelurahan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
2. Kepala Daerah memfasilitasi TKPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara terpadu melakukan Pendataan Kemiskinan *by name by address* (BNBA) lengkap dengan Identifikasi Permasalahan yang dihadapi UMK keluarga miskin.
3. Dukungan Kepala Daerah terhadap TKPK untuk lebih meningkatkan peran TKPK dalam program kegiatan Pemberdayaan UMK keluarga miskin guna penanggulangan kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- Alam, W. Y., Purnamartha, E., Putri, W., Audina, F., & Kharisma, R. (2024). Analisis SWOT Strategi Pemasaran (Studi Kasus pada Percetakan Mentari Jaya Duku Menanggal Surabaya). *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1014-1019;
- BPKP, 2023. Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor: PE.09.03/LHP-348/PW11/3.2/2023 tanggal 27 Juni 2023;
- BPS, 2021. Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara 2021;
- BPS, 2022. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-1181/33000/VS.500/08/2022 Perihal Hasil Penghitungan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten / Kota Tahun 2021-2022;
- BPS, 2023. Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara 2022;
- BPS, 2023. Infografis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Banjarnegara 2023;
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46;
- Kepmensos RI No. 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi.
- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 050/209 Th 2023 Tentang Penetapan 44 Desa Lokus Kemiskinan Kab. Banjarnegara.
- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 050/318 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara
- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 415/615 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara
- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 050/90 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banjarnegara;
- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 050/710 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara
- Nurcahya E & Benny M.A. 2020. Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. Universitas Padjadjaran, Bandung;
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Prayoga, B. (2023). pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja kota medan. *Journal Economics and Strategy*, 4(1), 42-51;
- Situmorang, M. H. S., & Susanti, Y. (2020). Pemodelan indeks keparahan kemiskinan di indonesia menggunakan analisis regresi robust. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(1), 51-63;
- Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 400.9.14/7/BUPATI/2023 Tanggal 14 April 2023 Tentang Pelaksanaan Gerakan "CAPING NANDA" Desa Dampingan Tahun 2023;
- TNP2K, 2011. Panduan Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Wardani, I. K., Susanti, Y., & Subanti, S. (2021). Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Analisis Regresi Robust. *Prosiding Snast*, 15-23;